

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM BERMASYARAKAT: STUDI PADA MASYARAKAT PANTAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Faridah

Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
Universitas Negeri Padang

Abstract

This research aims to; (a) identify women's involvement in the development of nagari (local state), (b) identify community efforts in empowering women to participate in the nagari development, (c) identify the women empowerment programs conducted by related agencies and institutions, (4) indentify the pattern of women empowerment in order to participate in the nagari development, and (5) identify community values that underlie women's participation in the nagari development. This research is descriptive qualitative. It is conducted in coastal areas of Padang Pariaman regency, represented by each nagari in each of these districts: Ulakan Tapakis, Sungai Limau, Batang Gasan, and Lubuk Alung. Data is collected using questionnaires, interviews, direct observation, and library research. Data is analyzed qualitatively. The result shows that; 1) only a small number of women involves in the nagari development, due to the low level of education, 2) most community's efforts in empowering women to participate in the nagari development depend only on the information or initiatives by the government whose meetings are part of government programs, 3) women empowerment program is held by the local agencies and institution, 4) women empowerment encouraged by the respondents are held in the coastal areas with coastal tourism, where women are active in coastal-based entrepreneurship, 5) women participation in every aspects of political, social, and cultural development are based on the value adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (traditional value based on the interpretation of the Koran).

Key words: *women involvement, participation, development*

Pendahuluan

Dalam falsafah adat Minangkabau dikatakan bahwa perempuan disebut dengan istilah Bundo Kanduang, artinya *limpapeh rumah nan gadang, umbun puruak pagangan kunci, umbun puruik aluang bunian, pusek jalo kumpulan tali, sumarak di dalam kampuang, hiasan dalam nagari, nan gadang nan basa buah, kok hiduik tampek banasa, kok mati tampek baniyet, kaundung-undung ka Madinah, kapayuang panji ka sarugo, ka pai ka tampek batanyo, ka pulang ka tampek babarito* (Kongres Perempuan Minangkabau, 2005). Dalam adat Minangkabau secara ideal normatif posisi perempuan atau Bundo Kanduang menempati ruang yang besar dalam penyelenggaraan pembangunan nagari. Aturan ini diperkuat lagi dengan hasil Musyawarah

Adat yang mengatakan :

1. Dalam setiap tingkat pengambilan keputusan dalam rapat adat atau nagari wajib melibatkan kaum perempuan
2. Dalam proses pengambilan keputusan, keputusan tertinggi berada dalam kerapatan suku. Anggota kerapatan suku terdiri dari unsur: 4 jinih (Penghulu, Manti, Dubalang, Malin), Urang Bajiniah (Mamak payuang, Mamak kaum, Camin, Urang tuo), Bundo Kanduang (perwakilan) dan kemanakan (perwakilan).
3. Ranji dibuat menurut garis keturunan ibu, untuk menentukan penurunan sako dan pusako
4. Ranji disahkan oleh Ninik Mamak suku dan diketahui oleh Ketua KAN dan Wali Nagari, kalau ingin legalitasnya diakui

Malam Bakuruang (Berkurung) ...

secara hukum positif diminta pengesahan oleh pengadilan negeri, Namun otoritas tetap pada suku, sedangkan KAN hanya mengapiakan pagaran tagak (Seminar di Solok tanggal 18-19 Januari 2005).

Dalam politik kenegaraan, dengan meratifikasi Konvensi internasional tentang hak politik perempuan, pemerintah telah membuktikan kemauan politiknya untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam teori kenegaraan dikatakan bahwa warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan. UUD 1945 menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam semua bidang kehidupan bernegara seperti politik, ekonomi, budaya, dan hankam, bigitu juga bidang lainnya pendidikan, hukum, kesehatan, partisipasi politik dan kesempatan kerja, yang diperkuat dengan lima prinsip dasar falsafah negara (Pancasila).

Namun secara de facto perempuan tetap tidak sederajat dengan laki-laki dalam hak dan kesempatan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh suatu kombinasi antara penerapan nilai tradisi, budaya dan undang-undang tertentu yang berlawanan dengan semangat dan prinsip persamaan hak, dan faktor-faktor lain yang perlu dilihat dalam kajian ini.

Kondisi sementara menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan seperti kembali ke nagari, kaum perempuan kurang memberikan perhatian, dan menyerahkan kepada pihak laki-laki. Disamping itu, masih ada peraturan yang dibuat pemerintah daerah belum mendukung ke arah terjadinya partisipasi perempuan dalam pembangunan nagari (Perda No.9 Tahun 2000 jo Perda No.2 Tahun 2007) tentang pemerintahan nagari. Berdasarkan data Biro Pemberdayaan Perempuan Pemda Sumatera Barat (2003) bahwa perempuan belum banyak ikut serta dalam pemerintahan nagari. Walaupun pada sebagian perempuan Minangkabau yang telah berpendidikan mulai berpartisipasi dalam berbagai organisasi dan ikut dalam pembangunan nagari tetapi ini masih relatif kecil bila dibanding dengan jumlah perempuan. Dilihat dari segi jumlah dan proporsi perempuan Sumatera Barat lebih besar dari laki-laki. Perbandingan usia muda perempuan 1.115.600 jiwa (51,41%) dan laki-laki 1.054.600 jiwa (48,59%), sementara usia

produktif perempuan sebanyak 1.338.400 jiwa (51,666%) sedangkan laki-laki 1.252.308 jiwa (48,34%) (Bappeda Propinsi Sumatera 2001). Khusus di Pemerintahan Nagari Sumatera Barat kondisi partisipasi perempuan dalam pembangunan cukup rendah yang ditunjukkan dengan jumlah mereka yang duduk dalam struktur pemerintahan nagari hampir tidak ada pada sebuah nagari (LPM UNP, 2004).

Pada hal Pemerintah juga memfasilitasi program pemberdayaan perempuan seperti dengan membentuk Menteri pemberdayaan perempuan pada tingkat nasional, adanya Biro Pemberdayaan perempuan di daerah, begitu juga pemberdayaan LSM dan LBH Perempuan, pihak pemerintah ikut mendorong dan memfasilitasinya, di DPRD ada quota tertentu bagi perempuan, di setiap pemerintahan nagari kecenderungan ada perempuan tetapi jumlah dan penempatannya perlu dikaji lebih mendalam dan dicarikan formulasi-formulasi ke arah membangun partisipasi perempuan. Untuk itu perlu dibangun pola-pola pemberdayaan perempuan khususnya dalam pembangunan nagari.

Dari jalan pikiran di atas, penelitian hendak menjawab masalah berikut:

1. Bagaimana keterlibatan perempuan dalam pembangunan nagari di sekitar Pantai Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari?
3. Bagaimana program pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Padang Pariaman?
4. Bagaimana pola pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari?
5. Apa nilai-nilai masyarakat yang mendasari keterlibatan perempuan dalam pembangunan nagari?

Yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Mengidentifikasi keterlibatan perempuan dalam pembangunan nagari.
2. Mengidentifikasi usaha yang dilakukan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari.
3. Mengidentifikasi program pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait.

4. Mengidentifikasi pola pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari.
5. Mengidentifikasi nilai-nilai masyarakat yang mendasari partisipasi perempuan dalam pembangunan nagari.

Manfaat penelitian ini adalah melahirkan rumusan pola pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan penyelenggaraan nagari di sekitar pantai Kabupaten Padang Pariaman, terutama menyangkut: program, kegiatan, organisasi, dan manajemen pemerintahan nagari. Secara rinci hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Untuk mengembangkan instrumen pola pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan penyelenggaraan nagari, dan memperkaya teori gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
2. Untuk mengembangkan pengkajian wanita sebagai pendekatan interdisipliner dalam pembangunan daerah.
3. Untuk mendapatkan informasi baru tentang pola-pola pemberdayaan perempuan pada masyarakat terbawah dan pemerintahan terrendah (Nagari) sehingga dapat diformulasikan kedalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kajian Pustaka

Peranan Perempuan dalam Pembangunan

Peranan perempuan dalam berbagai kehidupan dijelaskan dalam Alqur'an, dan UUD 1945, termasuk dalam kovenan perjanjian internasional. Prinsip manajemen sumberdaya keluarga mengatakan bahwa manajemen dalam keluarga diperlukan guna mencapai tujuan kehidupan yang lebih luas yang peranan ini dimainkan perempuan sebagai ibu (Guhardja, 1992). Peran perempuan terlihat dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan bidang lain dalam kehidupan kenagarian. Perempuan didorong untuk berpartisipasi dalam program pembangunan nagari ditawarkan sesuai dengan kebutuhan yang telah lama mereka rasakan. Untuk itu, perlu dirancang pola baru, yang diminta kepada perempuan tentang pola apa yang mereka ingini.

Konsep Gender

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin) sebagai ketentuan biologis (anugerah

Allah). Konsep gender suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dikenal lemah lembut, cantik emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri-ciri tersebut dapat dipertukarkan, atau bisa terjadi. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities) (Mansur Pakih, 1996).

Selanjutnya dikatakan bahwa ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk antara lain: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Bentuk-bentuk ketidakadilan ini akan dianalisis dalam mempengaruhi perilaku perempuan dalam partisipasi pembangunan nagari.

Definisi Operasional Konsep

Konsep-konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah:

- a) Keterlibatan atau Partisipasi perempuan dalam pembangunan nagari dalam lingkungan masyarakat daerah yaitu: keikutsertaan perempuan pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan nagari melalui lembaga formal dan informal seperti kelompok cerdik pandai, alim ulama, organisasi sosial level nagari, ormas, parpol, LSM pada level nagari, lembaga keuangan mikro di nagari, dan organisasi lainnya pada level nagari. dan pemerintahan nagari seperti keikutsertaan dalam perangkat pemerintahan nagari, sebagai anggota BPRN/Dewan Perwakilan Anak Nagari, dan partisipasi sebagai staf lain yang ada dalam pemerintahan nagari. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan angket dan wawancara yang mendalam bagi kelompok strategis.
- b) Usaha yang dilakukan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari adalah usaha-usaha yang tumbuh dari masyarakat sendiri, dan usaha-usaha yang difasilitasi pemerintah atau sebagai program pemerintah dalam pemberdayaan

Malam Bakuruang (Berkurung) ...

- perempuan. Data dikumpulkan dengan dokumenter dan pengamatan langsung oleh peneliti.
- c) Program pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait adalah program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah melalui Biro pemberdayaan perempuan pada pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.
 - d) Pola pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari adalah formulasi-formulasi sebagai alternatif yang akan ditawarkan dalam upaya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari. Formulasi ini dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan dengan angket, wawancara dan pengamatan langsung oleh peneliti.

Metodologi

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk mengetahui faktor-faktor pemberdayaan perempuan dalam pembangunan nagari, atau untuk menjawab apa penjelasan yang terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam pertanyaan penelitian (Manasse Malo, 1986). Atau sejenis penelitian sosial yang menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan menetapkan konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan oleh ilmu sosial (Vredenberg, 1979).

Penelitian ini dilakukan di Nagari pantai pada Kabupaten Padang Pariaman, yang diwakili oleh nagari di kecamatan, yaitu: 1) Ulakan Tapakis, 2) Sungai Limau, 3) Batang Gasan, dan 4) Lubuk Alung. Kemudian masing-masing diambil satu nagari. Dengan demikian, total pemerintahan nagari yang menjadi sampel adalah 4 nagari. Pengambilan sampel ini dilakukan secara purposive yaitu pemilihan secara sengaja dengan maksud menemukan fokus penelitian.

Responden yang terlibat adalah para penyelenggara pemerintahan nagari dan tokoh masyarakat nagari yang representatif sesuai dengan tujuan penelitian. Informasi lebih banyak dikumpulkan melalui informan kunci. Untuk lebih jelas terlihat pada tabel berikut:

Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan pengamatan langsung, di samping itu dibantu dengan studi kepustakaan (temuan LSM dan pemerintah). Artinya pendekatan terhadap setiap informan

dilakukan dengan cara pembicaraan yang mendalam (*depth interview*). Kuesioner sebagai daftar pertanyaan yang bersifat terbuka untuk mengetahui pengalaman responden. Untuk wawancara digunakan untuk mengejar jawaban yang tidak terjaring dalam kuesioner, dan pengamatan digunakan untuk melengkapi sekaligus alat kontrol data primer.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Wilayah Penelitian/ Kecamatan	Komposisi Informan	Jml
1	Ulakan Tapakis	Kel Pemerintah, Non pemerintah, dan perempuan	10
2	Sungai Limau	Kel Pemerintah, Non pemerintah, dan perempuan	10
3	Batang Gasan	Kel Pemerintah, Non pemerintah, dan perempuan	10
4	Lubuk Alung	Kel Pemerintah, Non pemerintah, dan perempuan	10
Total			40

Sumber: Data Badan Perberdayaan Masyarakat Padang Pariaman, 2007

Sedangkan penelitian kepustakaan digunakan untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan konsep para ahli atau peneliti yang lebih dahulu mengadakan penulisan yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari semua sumber, diolah dengan analisa kualitatif. Langkah utama adalah: membuat klasifikasi yaitu merumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama sampai kepada menafsirkan arti dari jawaban responden (J.Vredembrecht, 1979). Kemudian merumuskan pola keterlibatan perempuan dalam pembangunan di Pemerintahan Nagari.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam Buku Profil Statistik Gender Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat (BPM, 2004) dan Padang Pariaman Dalam Angka (Bappeda, 2005) dijelaskan bahwa secara geografis posisi Kabupaten Padang

pariaman terletak antara 0o 11' – 30 30' lintang selatan dan 98o 36' – 100o 40' Bujur Timur, dengan keadaan iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh angin darat dan laut serta curah hujan mencapai rata-rata 334,74 MM/bulan sepanjang tahun 2004 suhu udara berkisar antara 26o C sampai 31o C dengan panjang garis pantainya 60,5 Km dimana luas daratan Kabupaten Padang Pariaman setara dengan 3,15 % luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Padang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar dan sebelah Barat berbatasan dengan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia.

Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 Kecamatan dimana ke Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam merupakan kecamatan yang paling luas 228,70 Km² sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas wilayah yang terkecil dengan luas 25,56 KM², Kecamatan Sungai Geringing dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang merupakan wilayah yang paling tinggi yaitu 25 KM dari permukaan laut, sedangkan wilayah yang paling rendah adalah Kecamatan Ulakan Tapakis Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Batang Gasan dengan ketinggian +- 2 Meter dari permukaan laut. Keadaan topografi Kabupaten Padang Pariaman berupa daratan seluas 714,47 KM² atau 59,57% dari wilayah daratan merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 100 Meter dari permukaan laut, sedangkan yang lainnya merupakan daerah bergelombang dan berbukit yaitu dengan ketinggian 100 M sampai 15090 M dari permukaan laut, daerah dataran rendah terletak pada bagian barat yang mendekati pantai, sedangkan daerah bergelombang dan dataran tinggi pada bagian timur dan sebagian-bagian utara dimana pada daerah perbatasan dengan Kabupaten Solok, Tanah Datar dan Agam adalah merupakan daerah gugusan bukit barisan yang membujur sepanjang bagian barat pulau Sumatera.

Untuk daerah lokasi penelitian yaitu daerah pantai Kabupaten Padang Pariaman, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecamatan Ulakan Tapakih: terdiri dari Nagari Tapakih dan Nagari Ulakan
2. Kecamatan Sungai Limau: terdiri dari

- Nagari Kuranji Hilia dan Nagari Pilubang
3. Kecamatan Batang Gasam: terdiri dari Nagari Malai V Suku dan Nagari Gasan Gadang
4. Kecamatan Lubuak Alung: terdiri dari Nagari Luabuak Aluang

Kondisi sosial budaya masyarakat kabupaten ini hampir bersamaan dengan kabupaten lain di Sumatera Barat yang berdasar ideologinya ABS-SBK (Adat Basandi Syara, Syara' Basandi Kitabullah).

Temuan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu: (1) mengidentifikasi keterlibatan perempuan dalam pembangunan nagari, (2) mengidentifikasi usaha yang dilakukan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari, (3) mengidentifikasi program pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait, (4) mengidentifikasi pola pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari, maka yang menjadi temuan adalah sebagai berikut:

Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Nagari

Sebagian besar penduduk perempuan sekitar pantai Padang Pariaman bekerja pada sektor informal seperti pedagang ikan, membuat bordir, membuat kue-kue, sedikit sekali mereka yang bekerja pada sektor formal seperti guru, tenaga administratif honor di kantor Wali Nagari.

Menurut responden kecenderungan keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam pembangunan nagari untuk bidang politik bahwa mereka kaum perempuan kurang tertarik ikut dalam mengurus atau duduk dalam posisi perangkat Pemerintahan Nagari. Mereka yang ikut kecenderungannya adalah anak muda tamatan SLTA yang tidak mendapat pekerjaan pada sektor formal dan tidak pula tertarik bekerja dengan orangtuanya pada sektor informal. Untuk yang duduk di BPRN kecenderungan kecil, begitu juga di lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat nagari. Peran ini lebih banyak dilakukan oleh laki-laki.

Partisipasi perempuan dalam infrastruktur politik (kelompok-kelompok dalam masyarakat) berdasarkan pengakuan kaum perempuan bahwa tingkat pendidikan rata-rata rendah, sehingga peran sebagai cerdas pandai

Malam Bakuruang (Berkurung) ...

dalam nagari kurang dilibatkan oleh laki-laki. Posisi alim ulama perempuan hanya sebagai guru mengaji, ada yang ikut dalam kegiatan majelis ta'lim, tidak ada yang berperan sebagai Da'iyah atau juru ceramah agama. Untuk kegiatan PKK perempuan tertarik terutama untuk membuat makanan ringan yang berasal dari bahan dasar ikan atau kegiatan yang difasilitasi oleh pihak kecamatan dan kabupaten. Dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, Tarbiyah, dan Tarikat, menurut responden mereka kurang tertarik. Namun mereka agak suka pada kegiatan para normal (dukun). Sedangkan partisipasi untuk organisasi ekonomi seperti Koperasi, arisan, julo-julo, kecenderungan mereka ikut dan berpartisipasi aktif. Untuk partai politik menurut responden mereka tidak punya hubungan emosional yang serius, tetapi tergantung parpol memberikan bantuan atau tidak, jika ada bantuan mereka siap membantu parpol tersebut. Terhadap kelompok-kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kecenderungan mereka kaum perempuan tidak ingin masuk, kecuali yang ikut memperhatikan mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka seperti LBH, lembaga HAM, lembaga konsumen, dan organisasi masyarakat adat. Pada lembaga keuangan mikro seperti: Koperasi Simpan Pinjam, KUD, Baitul Mal Ta'lim, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagian terlibat, tetapi lebih banyak pada posisi pasif atau meminjam.

Untuk partisipasi perempuan pada bidang sosial budaya seperti ikut dalam pesta perkawinan, melahirkan, kematian, dan acara keagamaan, kaum perempuan ikut aktif. Sedangkan peran kaum perempuan bidang keamanan kurang dan lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki seperti : kegiatan gotong royong, ronda, atau posisi keamanan dalam nagari (paga nagari).

Usaha yang Dilakukan Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan Nagari

Upaya yang dilakukan masyarakat perempuan nagari dalam pemberdayaan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan nagari lebih banyak menunggu adanya informasi atau himbauan dari aparat pemerintah seperti program PKK, pertemuan-pertemuan yang digerakkan sebagai program pemerintah. Untuk usaha yang tumbuh dari masyarakat perempuan

sendiri hanya hal-hal yang bersifat rutin yang sudah dikerjakan selama ini, tidak ada inisiatif baru yang tumbuh dari masyarakat perempuan. Upaya lain muncul jika ada ide-ide yang datang dari perantau seperti pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, bekerja di daerah lain, kecenderungan anak perempuan mereka tertarik dengan informasi tersebut.

Untuk upaya yang tumbuh dari masyarakat perempuan yang bersifat formal antara lain: lebih banyak dilakukan oleh perempuan tamatan SLTA untuk mengajukan lamaran pekerjaan ke instansi pemerintah, bagi ibu-ibu lebih menekuni pekerjaan yang biasa dikerjakan. Untuk sektor informal kaum perempuan banyak terlibat sebagai pedagang kaki lima (PKL), atau bagi perempuan yang sudah bersuami, ikut suami seperti jualan sate, ikan, atau menjadi pedagang sayur/buah-buahan di kota lain.

Program Pemberdayaan Perempuan yang Dilakukan oleh Dinas/Instansi Pemerintah

Program pemberdayaan bagi perempuan yang telah dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait, berdasarkan data pihak Pemda Kabupaten Padang Pariaman bahwa semua dinas, badan dan kantor yang ada dalam SOTK kabupaten memberikan perhatian yang besar pada kaum perempuan seperti pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, pangan, pemukiman, kesempatan berusaha, dan jaminan sosial. Untuk bidang pendidikan anak perempuan diberikan fasilitas bebas SPP dengan mempermudah surat keterangan miskin dari Wali Nagari, buku cetak gratis.

Untuk bidang kesehatan seperti pos yandu, asi, informasi makanan sehat, bahaya zat pewarna dan pengawet yang membahayakan kesehatan ibu dan anak, diberikan informasi. Demikian untuk pemukiman diberikan informasi program rumah sehat, jamban, air bersih, dan sanitasi.

Untuk kesempatan kerja lebih banyak diserahkan kepada masyarakat nagari apakah keinginan bekerja pada sektor formal atau informal. Kondisinya para ibu banyak mempekerjakan anak perempuan untuk membantu pendapatan rumah tangga atau bekerja pada sektor informal. Kondisi ini sulit bagi pemda untuk melakukan perubahan. Untuk jaminan sosial diberikan pemda dalam bentuk bantuan bagi perempuan lansia untuk tinggal di rumah panti jompo, perempuan cacat juga

menjadi program pemda dalam bentuk pendidikan sekolah luar biasa.

Program pemberdayaan perempuan yang dilakukan pemerintah nagari antara lain: mempermudah administrasi bagi perempuan yang akan berangkat menjadi TKW ke luar negeri, pelayanan KTP, pelayanan surat keterangan seperti akte-akte. Sedangkan program bundo kanduang hampir tidak ada karena lebih tergantung adanya bantuan dari pemda atau pihak lain seperti program life skill dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendorong sektor usaha mereka. Untuk program pemberdayaan perempuan yang dirasakan masyarakat perempuan nagari seperti program-program PKK dan arisan. Kelompok lain belum ada program yang jelas bagi perempuan nagari.

Pola pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari

Kondisi perempuan pada nagari Ulakan berada pada wilayah pantai, dan juga memiliki tempat wisata pantai, sehingga kecenderungan perempuannya agak aktif dalam beberapa kegiatan usaha yang berbasis laut. Pola-pola yang ditawarkan responden dalam upaya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari antara lain:

- 1) Untuk kegiatan kepercayaan/keagamaan, perempuan diikutkan sebagai juru da'wah agama dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka dan terutama bagi anak perempuan mereka, sehingga kesemarakkan ajaran agama ada dalam nagari; menghidupkan pengajian-pengajian dan mendatangkan guru-guru agama agar kami dapat memahami agama dengan baik, sehingga kepercayaan yang kemurnian ajaran Islam agak terganggu dan sering muncul dalam nagari, dapat dicegah.
- 2) Untuk kegiatan organisasi: yang dibutuhkan dalam upaya pemberdayaan adalah organisasi yang dapat menyentuh langsung kepada kegiatan usaha kami, seperti koperasi, arisan, julo-julo, simpan pinjam yang tidak mengandung riba, selama ini sebagian masyarakat ikut dalam memberikan pinjaman lebih dalam usaha, untuk organisasi politik seperti partai politik, kami tidak punya perhatian karena belum ada manfaat parpol itu, yang dibutuhkan organisasi yang dapat menyalurkan aspirasi dan

memperjuangkan dalam pembangunan daerah,

- 3) Untuk kegiatan ekonomi: yang sangat membantu dalam pemberdayaan adalah program-program yang dapat mengatasi masalah: pembelian bahan dasar usaha yang murah, pemodal, sentuhan teknologi sederhana, pembukuan dalam usaha, dan cara mempertanggungjawaban keuangan dalam pinjaman dengan lembaga keuangan mikro seperti BPR.
- 4) Untuk kegiatan budaya: yang dapat membantu pemberdayaan adalah: ketersediaan sekolah yang betul-betul tidak ada pungutan, gratis terutama bagi anak perempuan kami yang tidak ada biaya sekolah; Pendidikan luar sekolah seperti pelatihan-pelatihan.
- 5) Untuk program hidup sehat diperlukan informasi dari semua pihak kesehatan, agar kara perempuan dapat memahami kebutuhan gizi anak dan lainnya.
- 6) Agar perempuan dapat berpartisipasi aktif diperlukan perubahan budaya, kebiasaan lama yang kurang mendukung pemberdayaan seperti: perilaku laki-laki/suami yang selalu merendahkan kaum perempuan, menganggap perempuan lemah, tidak berdaya, dan selalu direndahkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Bila sikap dan perilaku ini dapat dihilangkan maka tantangan kami dari perempuan akan teratasi; membuat program kesetaraan/persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam semua kegiatan.

Nilai-nilai yang hidup pada masyarakat daerah penelitian

Pada masyarakat daerah penelitian ini, ditemukan terintegrasinya nilai-nilai adat dengan nilai agama yang populer disebut dengan ABS-SBK atau Syarak mangato adat mamakai. Artinya Syara' (agama) menjadi standar nilai tertinggi, jika ada adat yang bertentangan dengan nilai agama, maka adat wajib menyesuaikan dengan nilai agama.

Pola kepemimpinan informal yang disebut dengan Tali Tigo Sapilin dan Tungku Tigo Sajaringan adalah Ninik Mamak, Alim Ulama, Cendikiawan dan Cerdik Pandai.

Adanya Sistem Pemerintahan adat yang secara hirarchi terlihat dari adanya Datuk/mamak yang terhimpun dalam KAN taua LAN atau BMAS. Di dalam Perda No.9 Tahun

Malam Bakuruang (Berkurung) ...

2000 Provinsi Sumatera Barat belum ada kejelasan apakah dipisahkan antara nagari adat dengan nagari pemerintahan seperti di Bali atau digabung, sehingga benturan sosial ini dapat diselesaikan dengan baik.

Alim ulama sebagai unsur pimpinan masyarakat yang mempunyai peranan dalam mengendalikan dan meningkatkan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai agama, sekaligus memiliki peranan dalam pengawasan pemerintahan dalam membuat kebijakan.

Cerdik Pandai adalah anak kenamaan yang mempunyai latar belakang pengetahuan yang luas mengenai adat istiadat, agama, budaya, IPTEKS, sebagai sumber cara mensejahterakan masyarakat nagari.

Sistem matriakat dengan menetapkan keberadaan wanita/perempuan (Bundo Kanduang) sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mewarnai kehidupan sosial kemasyarakatan pada semua aspek kehidupan baik sistem kepercayaan/ideologi, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem keamanan masyarakat di nagari.

Semangat dan jiwa dagang serta kewirausahaan sangat mendorong adanya usaha merantau ke daerah lain dalam mewujudkan usahanya, dengan telah dibentuk Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (PKDP) di seluruh Indonesia (Hasil Kajian Badan Pemberdayaan Masyarakat Padang Pariaman, 2004) yang telah ditambah pembahasannya oleh tim peneliti (2010).

Pembahasan

Keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam pembangunan nagari untuk bidang politik hanya sebegitau kecil yang tertarik ikut dalam mengurus atau duduk dalam posisi perangkat Pemerintahan Nagari, terutama anak muda tamatan SLTA. Untuk yang duduk di BPRN kecendrungan juga kecil, begitu juga di lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat nagari. Peran ini lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Menurut Mochtar Naim (2006) bahwa banyak faktor penentu antara lain sifat fisik, teknologikal, dan sosial budaya ikut mempengaruhi, di samping faktor ekonomi, pendidikan, dan struktur masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari.

Partisipasi perempuan dalam infrastruktur politik (kelompok-kelompok dalam masyarakat) berdasarkan pengakuan kaum perempuan bahwa tingkat pendidikan rata-rata

rendah, sehingga peran perempuan sebagai cerdas pandai dalam nagari kurang dilibatkan oleh laki-laki. SDAM perempuan masih rendah, Menurut Hendry Simamora (1997) manajemen sumberdaya manusia (*human resources management*) adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Manajemen sumberdaya manusia juga menyangkut dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan. Manajemen sumberdaya manusia melibatkan semua keputusan dan praktek manajemen yang secara langsung mempengaruhi sumberdaya manusia, orang-orang yang bekerja bagi organisasi.

Untuk partisipasi perempuan pada bidang sosial budaya seperti ikut dalam pesta perkawinan, melahirkan, kematian, dan acara keagamaan kaum perempuan ikut aktif. Sedangkan peran kaum perempuan bidang keamanan kurang dan lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki seperti : kegiatan gotong royong, ronda, atau posisi keamanan dalam nagari (paga nagari). Agar ada keterlibatan diperlukan sistem manajemen yang baik dan terbuka dalam pemerintahan nagari seperti dikatakan Stoner (1981) bahwa "management is the process of planning, organizing, leading and controlling the efforts of organizing member and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals" Artinya esensi manajemen adalah aktivitas bekerja dengan orang lain agar mencapai berbagai hasil. Artinya ada beberapa dimensi dalam manajemen: antara lain: dalam manajemen terjadi kegiatan.

Kecenderungan upaya yang dilakukan masyarakat perempuan nagari dalam pemberdayaan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan nagari lebih banyak menunggu adanya informasi atau himbauan dari aparat pemerintah. Pada dasarnya upaya masyarakat tergantung kepada masyarakat itu sendiri dan lebih banyak dipengaruhi budaya masyarakat tersebut, sebagaimana dikatakan David Easton: bahwa "anggota-anggota setiap masyarakat bertindak atau bertingkah laku di dalam kerangka dari suatu budaya yang membentuk tujuan-tujuan umum maupun khusus mereka dan prosedur-prosedur yang oleh mereka dianggap harus diterapkan untuk mencapai

tujuan-tujuan itu. Setiap kebudayaan mendapatkan sifat uniknya sebagian dari fakta, dan kebudayaan itu menekankan beberapa segi perilaku khusus untuk pemeliharaan keharmonisan serta mengandung patokan-patokan nilai dalam suatu masyarakat” (David Easton, dalam Mochtar Mas’oed, 1986).

Program pemberdayaan bagi perempuan yang telah dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait, berdasarkan data pihak Pemda Kabupaten Padang Pariaman bahwa semua dinas, badan dan kantor yang ada dalam SOTK kabupaten memberikan perhatian yang besar pada kaum perempuan seperti pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, pangan, pemukiman, kesempatan berusaha, dan jaminan sosial.

Untuk bidang pendidikan anak perempuan diberikan fasilitas bebas SPP dengan mempermudah surat keterangan miskin dari Wali Nagari, buku cetak gratis.

Untuk kesehatan seperti pos yandu, asi, informasi makanan sehat, begitu juga hal zat pewarna, pengawet yang membahayakan kesehatan ibu. Untuk pemukiman diberikan informasi program rumah sehat, jamban, air bersih, dan sanitasi.

Untuk kesempatan kerja lebih banyak diserahkan kepada masyarakat nagari apakah keinginan bekerja pada sektor formal atau informal. Kondisinya para ibu banyak memperkerjakan anak perempuan untuk membantu pendapatan rumah tangga atau bekerja pada sektor informal. Kondisi ini sulit bagi pemda untuk melakukan perubahan. Untuk jaminan sosial diberikan pemda dalam bentuk bantuan bagi perempuan lansia untuk tinggal di rumah panti jompo, perempuan cacat juga menjadi program pemda dalam bentuk pendididkan sekolah luar biasa.

Program pemberdayaan perempuan yang dilakukan pemerintah nagari antara lain: mempermudah administrasi bagi perempuan yang akan berangkat menjadi TKW ke luar negeri, pelayanan KTP, pelayanan surat keterangan seperti akte-akte. Sedangkan program bundo kanduang hampir tidak ada karena lebih tergantung adanya bantuan dari pemda atau pihak lain seperti program life skill dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendorong sektor usaha mereka. Untuk program pemberdayaan perempuan yang dirasakan masyarakat perempuan nagari seperti program-program PKK dan arisan. Kelompok

lain belum ada program yang jelas bagi perempuan nagari. Tujuan hidup keluarga amanat UU Keluaraga secara nasional sudah memprogram dalam suatu prinsip manajemen. Prinsip manajemen sumberdaya keluarga mengatakan bahwa manajemen dalam keluarga diperlukan guna mencapai tujuan hidup keluarga (Guhardja, 1992). Program ke 6 dari 10 program PKK adalah pendidikan dan ketrampilan yang dimaksudkan untuk mendidik dan meningkatkan ketrampilan wanita dan anggota keluarga lain. Berdasarkan hasil penelitian Ratna Megawangi (1996) program PKK dapat meningkatkan dan mempengaruhi peranan nilai dan norma perilaku hidup sehat. Nilai adalah suatu yang dijunjung tinggi dan dianggap penting dalam keluarga. Penanaman nilai mempengaruhi sikap dan tingkah laku anak dan anggota keluarga lain (Guhardja, 1992). Ibu memegang peran strategis dalam pembinaan perilaku hidup sehat dalam suatu keluarga.

Keluarga sebagai organisasi masyarakat terkecil perlu berhubungan dengan organisasi lain dalam mengembangkan wawasan hidup sehat seperti organisasi yang bergerak dalam bidang kesehatan baik yang digerakkan oleh masyarakat maupun pemerintah. Keikutsertaan seorang ibu dalam mengetahui pola hidup sehat timbul dari motivasi dan terdorong oleh kebutuhan hidup yang melatar belakanginya (Suwardi, 1982). Ibu rumah tangga didorong untuk berpartisipasi bahwa proyek kesehatanyang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan yang telah lama mereka rasakan. Menurut hasil penelitian Sajogyo (1983) bahwa keterlibatan wanita pedesaan dalam kegiatan non formal yang diharuskan dari atas seperti PKK masih terbatas pada wanita dari rumah tangga lapisan yang mampu.

Agar perempuan dapat berpartisipasi aktif diperlukan perubahan budaya, kebiasaan lama yang kurang mendukung pemberdayaan seperti: perilaku laki-laki, suami yang selalu merendahkan kaum perempuan, menganggap perempuan lemah, tidak berdaya, dan selalu direndahkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Bila sikap dan perilaku ini dapat dihilangkan maka tantangan kami dari perempuan akan teratasi; membuat program kesetaraan/persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam semua kegiatan. Pemahaman gender bagi kaum laki-laki amat diperlukan. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata

Malam Bakuruang (Berkurung) ...

gender dengan kata seks (jenis kelamin) sebagai ketentuan biologis (anugerah Allah). Konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kamu laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dikenal lemah lembut, cantik emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri-ciri tersebut dapat dipertukarkan, atau bisa terjadi. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities) (Mansur Pakih, 1996).

Selanjutnya dikatakan bahwa ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk antara lain: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Bentuk-bentuk ketidakadilan ini akan dianalisis dalam mempengaruhi perilaku ibu rumah tangga dalam memenuhi gizi anak.

Simpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam pembangunan nagari cenderung rendah, karena tingkat pendidikan perempuan rata-rata rendah, sehingga peran sebagai cerdik pandai dalam nagari kurang dilibatkan oleh laki-laki.
2. Kecenderungan dalam upaya pemberdayaan dalam nagari untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan nagari lebih banyak menunggu, digerakkan sebagai program pemerintah. Untuk usaha yang tumbuh dari masyarakat perempuan sendiri hanya hal-hal yang bersifat rutin, tidak ada inisiatif baru yang tumbuh dari masyarakat perempuan.
3. Program pemberdayaan bagi perempuan yang telah dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait, antara lain anak perempuan diberikan fasilitas bebas SPP dengan mempermudah surat keterangan miskin dari Wali Nagari, buku cetak gratis, menyediakan sekolah yang betul-betul tidak ada pungutan, gratis terutama bagi anak perempuan kami yang tidak ada biaya

sekolah; Pendidikan luar sekolah seperti pelatihan-pelatihan.

4. Upaya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari dilakukan dengan pola antara lain: memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka dan terutama bagi anak perempuan mereka, mengaktifkan koperasi, arisan, julo-julo, simpan pinjam yang tidak mengandung riba, menyalurkan aspirasi politik dan memperjuangkan dalam pembangunan daerah, membantu mengatasi masalah bidang dengan pembelian bahan dasar usaha yang murah, pemodalan, sentuhan teknologi sederhana, pembukuan dalam usaha, dan cara mempertanggungjawaban keuangan dalam pinjaman dengan lembaga keuangan mikro seperti BPR.
5. Terintegrasinya nilai-nilai adat dengan nilai agama yang populer disebut dengan ABSSBK dalam kehidupan masyarakat. Masih kuatnya pola kepemimpinan informal yang disebut dengan Tali Tigo Sapilin dan Tungku Tigo Sajarangan adalah Ninik Mamak, Alim Ulama, Cendikiawan dan Cerdik Pandai.

Saran

Yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Agar keterlibatan perempuan dalam pembangunan nagari dapat ditingkatkan, perlu ada perlakuan khusus dalam kebijakan pemerintahan dalam melibatkannya.
2. Usaha yang dilakukan masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Nagari digerakkan sendiri oleh masyarakat perempuan dengan menciptakan suasana yang kondusif kearah itu.
3. Program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Dinas/Instansi Pemerintah. Agar lebih efektif dengan menanyakan kepada kebutuhan masyarakat perempuan itu sendiri.
4. Pola pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari dengan duduk bersama dan dikerjakan secara bersama untuk berpartisipasi.

Daftar Rujukan

- Guhardja, S Dkk. (1992). *Diktat Manajemen Sumber Daya Keluarga*. Jurusan GMSK Faperta IPB: Bogor.
- Panduan Kongres Perempuan Minangkabau (2005). *Revitalisasi Tradisi Matrilineal Masyarakat Minangkabau*. Padang.
- LPM UNP. (2004). *Strategi Pemberdayaan Pemerintahan Nagari*. Hasil Pengaduan Kepada Pemerintahan Nagari Kabupaten Agam. LPM UNP: Padang.
- Malo, Manasse. (1986). *Metode Penelitian Sosial*. Modul 1-5. Universitas Terbuka. Karunike: Jakarta.
- Mansur Fakhri (1996). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Megawangi, Ratna, Dkk. (1996). *Peranan Suami Dalam Peningkatan Kampanye Ibu Sehat Sejahtera*. Kerjasama Jurusan Gizi Masyarakat Dan Sumber Daya Keluarga dan BKKBN: Jakarta.
- (1996). *Evaluasi Program PKK dan Kaitannya Dengan Kehidupan Keluarga Pedesaan*. Laporan Penelitian HB Fak. Pertanian IPB: Bogor.
- Tim Musyawarah Adat (2005). *Ketentuan Adat Terhadap Perempuan Di Sumatera Barat*: Seminar di Solok 18-19 Januari 2005.
- Sajogyo, Pudjiwati. (1983). *Meneliti Peranan wanita di Pedesaan*. IPB: Bogor.
- Vredenburg, J. (1979). *Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia: Jakarta.
- UU No. 39/ 1999 tentang HAM
- UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Perda No. 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari